



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM KOMISI X DPR RI DENGAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPR PAPUA**

Tahun Sidang	: 2021-2022
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke-	: -
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Selasa, 21 September 2021
Waktu	: Pukul 14.00 WIB s.d. 15.30 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X Gedung Nusantara I DPR RI (secara Fisik dan Virtual)
Ketua Rapat	: Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, M.M. / Wakil Ketua Komisi X DPR RI
Acara	: Konsultasi Mengenai Penyelenggaraan PON XX dan PEPARNAS XVI
Sekretaris Rapat	: Dadang Prayitna, S.IP., M.H. (Kabag Sekretariat Komisi X DPR RI)
Hadir	: Pimpinan: 1. H. SYAIFUL HUDA 2. AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI, S.S., M.M. 3. Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, MPP. 4. Dr. DEDE YUSUF M.E, S.T., M.I.Pol. 5. Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, M.M.

Anggota:

Fraksi PDI Perjuangan

6. dr. SOFYAN TAN (I)
7. PUTRA NABABAN (I)
8. MY ESTI WIJAYATI (I)
9. PUTI GUNTUR SUKARNO, S.IP. (I)
10. Dr. AHMAD BASARAH (I)
11. M. GURUH IRIANTO SUKARNO PUTRA (I)
12. RANO KARNO, S.IP. (I)
13. Dr. ANDREAS HUGO PAREIRA (I)
14. Dra. ADRIANA CHARLOTTE DONDOKAMBEY,
M.Si. (I)
15. VANDA SARUNDAJANG (I)

Fraksi Partai GOLKAR

16. FERDIANSYAH, S.E., M.M. (I)
17. Dr. H. A. MUJIB ROHMAT, M.H. (I)
18. H. MUHAMMAD NUR PURNAMASIDI (I)
19. DR. Drs. ADRIANUS ASIA SIDOT, M.Si. (I)
20. ADRIAN JOPIE PARUNTU (I)
21. ROBERT JOPPY KARDINAL, SAB. (I)

Fraksi Partai GERINDRA

22. ALI ZAMRONI, S.Sos. (I)
23. Prof. Dr. Ir. DJOHAR ARIFIN HUSIN
24. Hj. HIMMATUL ALIYAH, S.Sos., M.Si. (I)
25. Ir. H. NUROJI (I)
26. MARTINA, S.I.Kom., M.Si. (I)
27. H. MUHAMMAD NUR (I)
28. ELNINO M. HUSEIN MOHI, S.T., M.Si. (I)

Fraksi Partai NASDEM

29. RATIH MEGASARI SINGKARU, M.Sc. (I)
30. RIAN FIRMANSYAH, S.Pd. (I)
31. LESTARI MOERDIJAT (I)
32. EVA STEVANY RATABA (I)
33. Dra. Hj. TINA NUR ALAM, M.M. (I)

Fraksi PKB

34. Dr. H. MUHAMMAD KADAFI, S.H., M.H. (I)
35. Drs. H. BISRI ROMLY, M.M. (I)
36. MUH. HASSANUDIN WAHID (I)
37. H. AN'IM FALACHUDDIN MAHRUS (I)
38. Drs. H. ANDI MUAWIYAH RAMLY, M.Si. (I)

Fraksi Partai DEMOKRAT

39. A. S. SUKAWIJAYA ALIAS YOYOK SUKAWI (I)
40. Ir. BRAMANTYO SUWONDO, M.M. (I)
41. DEBBY KURNIAWAN, S.Kom. (I)
42. ANITA JACOBA GAH, S.E. (I)

Fraksi PKS

43. Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., M.Psi.T. (I)
44. H. MUSTAFA KAMAL, S.S. (I)
45. Dr. H. FAHMI ALAYDROES, M.M., M.Ed. (I)
46. Hj. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag. (I)

Fraksi PAN

47. Hj. drh. DEWI CORYATI, M.Si. (I)
48. DESY RATNASARI, M.Si., M.Psi. (I)
49. Prof. Dr. ZAINUDDIN MALIKI, M.Si. (I)
50. MITRA FAKHRUDDIN MB. (I)

Fraksi PPP

- 51. Hj. ILLIZA SAADUDIN DJAMAL, S.E. (I)
- 52. ROJIH (I)

Undangan

- 1. KAMASAN JACK KOMBOY (Ketua Pansus PON XX dan PEPARNAS XVI)
- 2. HERLIN BEATRIX MARYKE MONIM, S.E.
- 3. MUHAMMAD DARWIS MASSI, S.E.
- 4. HERMAN YOGOBI
- 5. NATAN PAHABOL, S.Pd.
- 6. TIMILES YIKWA, S.E.
- 7. Ir. H. JUNAEDI RAHIM
- 8. PETRUS PIGAI
- 9. YOHANIS L. RONSUMBRE, S.Sos.

KETUA RAPAT/F-PKS (Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, M.M.):

Selamat siang buat kita semuanya.

Bapak/Ibu yang saya hormati dari DPR Papua.

Selamat datang di Jakarta dan pertama perlu saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya karena kehadiran Bapak/Ibu untuk menyampaikan mungkin aspirasi atau apa. Konon katanya tentang dinamika dan perkembangan, serta tentu mudah-mudahan banyak berita baik dari Papua karena kita sangat berharap tanggal 2 ya? Tanggal 2 Oktober itu nanti kita akan menyaksikan *opening ceremony* dari PON XX yang dilaksanakan 2021 ini di Papua dan kita sudah hadir sana sebelum ada infrastruktur yang lengkap sampai kemarin kita sama Prof. Djohar juga dengan semua rombongan lengkap. Jadi Komisi X semuanya ada di Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura, sama satunya ke Mimika. Jadi semuanya lengkap ada 53 orang semuanya hadir dan perkembangannya luar biasa.

Bapak/Ibu ini ada permohonan dari Dewan Perwakilan Rakyat Papua untuk menyampaikan mungkin aspirasi atau apa atau istilahnya konsultasi penyelenggaraan PON XX dan PPN XIV. Sekali lagi kami berharap mendapatkan berita-berita baik karena saya dan teman-teman sudah ke sana dan perkembangannya luar biasa artinya kesiapan dari segi infrastruktur saya kira jauh dari yang diperkirakan. Jadi kemarin sudah jadi semuanya Stadion Papua Bangkit yang sekarang namanya Lukas Enembe Stadium, kemudian ada yang akuatik, kemudian juga ada Istora *indoor* segala macam itu juga sudah siap semuanya. Sekali lagi hari ini selamat datang di DPR RI Komisi X yang membidangi pemuda dan olahraga.

Jadi kita Komisi X itu bermitra dengan Kemendikbud Ristek, kemudian Kemenparekraf, kemudian Kemenpora, dan satunya Perpustakaan jadi ada empat mitra Komisi X. Jadi kalau tentang PON ya kita di sini karena sudah dekat jadi kemarin dipaksa untuk datang ke sana semuanya datang ke sana. Tadi baru saja di Komisi X ini jam 09.00 WIB ada rapat dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga, rapat kerja untuk RKA K/L Tahun 2022, tadi jam 09.00 sampai setengah 10.30 WIB. Kemudian jam 11.00 WIB ada paripurna baru saja selesai kemudian ini anggota Komisi X sesuai dengan ininya masing-masing. Ada yang di Banggar, ada yang di Baleg dan seterusnya dan Ketua Komisi X sekarang ada di Pemberitaan *pressroom* DPR RI.

Saya Abdul Fikri Faqih Wakil Ketua Komisi X dan ditemani Profesor Djohar Arifin. Mungkin kalau yang suka bola tahun 1970-an pemain PSMS Medan. Kemudian mungkin yang belakangan kalau ada yang juga pengurus PSSI, Beliau pengurus PSSI juga sekarang jadi Anggota DPR RI Komisi X dari Fraksi Partai Gerindra, Daerah Pemilihannya Sumatera Utara III, 10 kabupaten/kota karena terlalu banyak enggak saya sebut. Saya Fikri Faqih dari Partai Keadilan Sejahtera/PKS, Daerah Pemilihannya Jawa Tengah IX. Mungkin sampai Papua juga ya? Karena di Jakarta ini warga saya banyak sekali. Orang Jakarta enggak bisa hidup kalau tanpa ada orang dari saya. Warteg, dari Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes, telur asin.

Orang Jakarta kalau mau agak irit ya ke warteg tapi kalau yang ini mungkin ke atas bisa ke warung Padang dan seterusnya. Sekali lagi terima kasih dan selamat datang.

Selanjutnya karena ini audiensi bukan rapat dengar pendapat, bukan rapat dengar pendapat umum, juga bukan rapat kerja maka kita nanti akan hanya mendengarkan dan kemudian kebetulan tadi baru raker, besok raker lagi tapi tentang RUU SKN/Sistem Keolahragaan Nasional. Jadi RUU SKN ini sudah sampai ke Baleg, sudah sampai ke paripurna dan sekarang sudah pembahasan tahap dua yaitu pembahasan RUU dengan kementerian dan kita sudah bikin Panja dan nanti akan pembahasan. Kalau ada masukan juga tentang RUU Sistem Keolahragaan Nasional juga saya kira bisa.

Jadi ini nanti apa pun yang akan disampaikan nanti akan dicatat semuanya kalau ada berkas boleh saja saya terima, kemudian tidak usah berlama-lama besok kita berikan kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga karena besok ada rapat kerja. Sungguhpun judulnya RUU Sistem Keolahragaan Nasional tetapi karena ada aspirasi apalagi kalau mendesak maka kita sampaikan besok hari Rabu tanggal 22, paginya di DPR RI saya.

Begitu saya kira dan selanjutnya silakan mungkin satu diperkenalkan lebih dahulu kemudian nanti disampaikan maksud dan tujuan. Kalau mungkin ada hal yang tadi dokumen atau apa nanti bisa secara resmi disampaikan tapi paling tidak narasinya nanti disampaikan semua secara lengkap. Silakan *monggo*.

KETUA PANSUS PON XX DAN PEPARNAS XVI (KAMASAN JACK KOMBOY):

Baik terima kasih.

**Bapak Wakil Ketua Komisi X.
Profesor Djohar Arifin sebagai Anggota Komisi X.**

Ini mantan bos saya dahulu ini di PSSI ini.

KETUA RAPAT:

Berarti saya tidak salah memperkenalkan.

KETUA PANSUS PON XX DAN PEPARNAS XVI (KAMASAN JACK KOMBOY):

Kami dari Pansus PON XX dan PEPARNAS XVI di DPR Provinsi Papua di sana sebutannya itu adalah DPRP atau DPR Papua karena kekhususannya itu, kira-kira begitu. Kami mengucapkan terima kasih karena bisa dapat diterima di Komisi X sehingga penting bagi kami untuk dapat berkomunikasi karena terkait hal-hal yang menjelang PON ini yang nantinya akan dibuka pada tanggal 2 Oktober nanti. Jadi kami sudah mengerjakan apa yang menjadi tugas kami sebagai fungsi pengawasan terhadap

penyelenggaraannya PON. Tapi ada hal-hal yang juga bersentuhan langsung atau berurusan dengan pemerintah pusat seperti itu. Suratnya kami sudah masukkan lewat Bapak Natan.

Tapi mungkin sebelum jauh saya lanjut ke sana mungkin saya mencoba memperkenalkan kami tim yang datang. Saya di sini sebagai Ketua Pansusnya Pak atas nama Jack Komboy dari Partai Hanura dan di sebelah kiri saya ini Bapak Natan Pahabol Beliau dari Fraksi Gerindra dan di sebelahnyanya Bapak Herman Yogobi, Beliau dari partai PDI Perjuangan. Saya di DPR Papua sementara dipercayakan sebagai Wakil Ketua Komisi V yang membidangi pendidikan, kesehatan, olahraga dan lain-lain Pak, ada sosial, termasuk perpustakaan dan lain-lain semuanya ada di dalam.

Pak Natan ini sebagai Anggota di Komisi V yang tadi saya sebut mitra kita dan Pak Herman Yogobi dari PDIP, Beliau dari Komisi IV yang membidangi infrastruktur seperti itu dan di sebelah kanan saya ini Ibu Herlin Beatrix Monim dari Partai Nasdem dan Beliau menjabat sebagai Ketua Komisi IV yang membidangi infrastruktur dan sumber daya alam. Yang di sebelahnyanya Pak Petrus Pigai, Beliau dari Partai PAN Anggota Komisi II yang membidangi bidang ekonomi dan yang di depan kami ini Bapak H.Junaedi, Beliau adalah dari Partai Berkarya, Beliau di Komisi III jadi komisi yang membidangi keuangan seperti itu.

Di sebelahnyanya Bapak Timiles Yikwa, Beliau dari Partai PAN, Beliau adalah Ketua Komisi V, jadi itu Ketua saya di komisi begitu. Yang di sebelah kiri ini Bapak Yohanis Ronsumbre, Beliau dari anggota pengangkatan 14 kursi dalam rangka otsus. Jadi kami di sana ada yang dipilih partai ada yang diangkat begitu karena kekhususan itu. Jadi Beliau di sana dikatakan kelompok khusus begitu dan yang di ujung itu adalah partainya Bapak. Bapak Darwis Massi Beliau dari PKS dan di Komisi II membidangi ekonomi. Di belakang saya ini adalah staf ahli kami dan para staf. Inilah kami Pak, kami dari Pansus PON XX dan PEPARNAS XIV. Kami datang kemari setelah melaksanakan pengawasan kami di daerah.

Cuma memang sampai hari ini ada hal-hal yang mungkin sangat diperlukan dorongan dari Komisi X untuk bagaimana bisa yang menjadi tanggung jawab APBN terhadap penyelenggaraan itu yaitu transferan dana berjumlah 1,4 triliun. Karena di dalamnya itu ada *item-item* yang sangat diperlukan sekali terhadap pelaksanaan PON ini itu yang kami dari Pansus merasa penting hadir di Komisi X dan kami berencana besok ke Kemenpora dan Kemenkeu untuk menanyakan kejelasan atau kelangsungan dari dana 1,4 triliun ini. Di dalam dana 1,4 triliun ada untuk biaya konsumsi itu sekitar 700-800 miliar seperti itu, atlet dan ofisial dan juga di dalamnya ada untuk transportasi lokal untuk akomodasi dan biaya juri dan lain-lain.

Nah sampai hari ini belum ada kejelasan terkait anggaran ini sedangkan pelaksanaan kita tinggal menghitung hari. Kami ada ya tinggal tanggal 3 Oktober akan pembukaan dan di 22 September ini sudah ada pertandingan-pertandingan yang *kick off* sudah jalan terlebih dahulu mendahului seperti *softball* dan sepak bola nantinya tanggal 27 September ini

sudah jalan. Itulah yang mendorong kami dari Pansus kami memutuskan pentingnya kami harus hadir di Komisi X pertama, selanjutnya kami akan mengadakan mohon juga ada bantuan dari Komisi X mungkin dapat berkomunikasi, bahwa mereka bisa berkomunikasi dengan Kemenpora untuk kami ini dari Pansus bisa bertemu dengan Kemenpora untuk ada kejelasan itu.

Karena kemarin setelah kami berjumpa dengan PP PON, berjumpa dengan klaster-klaster yang akan menyelenggarakan ini Kota Jayapura, Kabupaten Timika, dan Merauke mereka mengatakan ya kami butuh kejelasan terkait ini. Itulah kami hadir di sini Pak untuk bagaimana mau menanyakan kepada pihak yang terkait supaya penyelenggaraan ini bisa jalan dengan maksimal. Karena kata-kata atau bahasa yang sering digunakan sebagai ininya kita itu adalah kita orang bisa. Nah kata kita orang bisa ini kan dia sangat berarti sekali bahwa kami mau mengatakan kepada provinsi yang lain bahwa kami di Papua juga siap menyelenggarakan PON. Kata kita orang bisa itu penting sekali diterjemahkan.

Kalau terkait anggaran 1,4 triliun ini belum hadir sampai pada saatnya itu yang menjadi kekhawatiran kita bahwa nanti pada saat pelaksanaan bisa terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Akhirnya keputusan yang diambil oleh PB PON itu hari ini adalah bagaimana mereka melangkahi dahulu dengan meyakinkan para pihak ketiga ini untuk kalau bisa jalan dahulu sambil kita menunggu transferan uang 1,4 triliun ini. Nah itu yang kami dari Pansus merasa sangat penting untuk hadir di sini untuk menanyakan hal-hal ini kita memulai dari Komisi X. Makanya kami mohon mungkin ada juga bantuan daripada Pimpinan Komisi X beserta anggota untuk dapat juga mendorong hal-hal yang tadi sudah disampaikan oleh kita.

Itu maksud dan kami datang ke sini terkait anggaran transfer APBN sekitar 1,4 triliun yang sampai hari ini seluruh komponen menunggu belum ada kejelasan dan kepastian itu. Itulah yang mendorong kami Pansus hasil diskusi kita bahwa kita harus masuk ke Jakarta bertemu Komisi X, Kemenpora dan Kemenkeu supaya ada penjelasan. Karena semua orang mendorong Pansus untuk bagaimana bisa ke Jakarta dan menanyakan itu. Jadi kami perlu mungkin ada jawaban dari pihak yang terkait untuk kami dapat menyampaikan kepada masyarakat di sana dan juga ketua-ketua klaster, kepala daerah dan lain-lain. Itu sebenarnya tujuan utama kami datang ke sini Pak. Kami merasa bahwa Komisi X ini juga mengurus terkait olahraga, terkait PON, dan lain-lain itulah yang mendorong kami datang ke sini.

Mungkin sementara itu Pak pimpinan. Mungkin itu yang kami dapat sampaikan. Kami dari DPRP juga sudah menyurati Kemendagri menyampaikan hal-hal terkait ini cuma sampai sekarang belum ada penjelasan kepada kita terkait dana 1,4 triliun ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Pak Ketua, izin. Waktu saya kembalikan. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ada tambahan mungkin? Ada yang mau? Silakan mungkin sekalian.

ANGGOTA DPR PAPUA (NATAN PAHABOL, S.Pd.):

Baik terima kasih Pimpinan.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita.

**Yang saya hormati Wakil Ketua Komisi X DPR RI.
Juga Kakak saya dari satu partai.**

Terima kasih karena kebetulan saya ambil nomor pada waktu kunjungan ke Papua dan sudah *connect* akhirnya terima kasih banyak karena sudah berhasil. Kemarin kami baru tiba dan ini pertama kita bisa dapat kehormatan untuk mengunjungi sekaligus menyampaikan. Singkatnya Pak Ketua Pansus sudah sampaikan, saya cuma mempertegas saja bahwa besok Komisi X pasti sudah merencanakan pertemuan dengan Kemenpora. Jadi mungkin kita juga mau bertemu tetapi sedikit belum mendapat akses. Karena itu Pak Wakil kalau bisa dapat membantu kami untuk komunikasi supaya sebelum atau setelah itu kami bisa menyampaikan maksud dan tujuan juga kepada Kemenpora. Itu pertama.

Yang kedua persiapan-persiapan kita sebagai tuan rumah itu dengan Pak Gubernur sudah menyampaikan bahwa terkait akomodasi, transportasi, dan konsumsi daripada seluruh atlet dan ofisial yang datang itu tanggung jawab kita sebagai tuan rumah. Mungkin komisi juga sudah turun ke sana dan pasti banyak mendapat informasi, tapi Pak yang saya meragukan adalah kalau sampai dengan 1,4 triliun itu kalau belum turun itu tidak bisa batal ya untuk pertandingan dan lain-lain itu tidak bisa batal, ini tetap jalan. Konsekuensinya Pak Gubernur, Ketua Harian itu Pak Yunus Wonda itu Beliau sampaikan bahwa konsekuensi terakhir adalah apa pun kita menyiapkan untuk menjadi makanan seperti sagu, ubi itu makanan orang Papua.

Jadi tolong sampaikan kalau sampai dengan 1,4 triliun belum turun pertandingan kegiatan nasional ini tidak bisa kita tunda, ini tetap jalan dan apa pun yang ada di Papua kita siap untuk bisa sebagai tuan rumah bisa menyediakan segala sesuatu untuk bisa menyukseskan kegiatan besar ini. Itu mungkin yang pertama kita pesan supaya sebagai wakil kita pesan kepada abang-abang yang ada di DPR RI. Mungkin satu keraguan bahwa sebelumnya ada 1,7 triliun atau 1,8 triliun sudah kirim dan ini mungkin laporan belum jelas sehingga ada informasi juga yang masuk ke sini tetapi kalau itu yang menghambat kami juga berharap mungkin 1,4 triliun ini barangkali bisa diteruskan dahulu dengan catatan-catatan khusus supaya kalau salah menggunakan dan lain-lain.

Kalau saya dengar dari Ketua Harian, Pak Yunus Wonda itu dia juga sebagai Wakil Ketua I DPRP dan Beliau sampaikan sampai dengan minggu pertama atau minggu kedua bulan September ini kalau belum ada transfer itu maka kemungkinan besar pasti pemerintah setempat juga tidak berani menerima uang besar itu sebab itu risiko berat juga. Jadi ini mungkin menjadi catatan penting yang kami sampaikan sebagai wakil rakyat bahwa secara

garis besar kami siap untuk menerima dan menyelenggarakan kegiatan besar ini tetapi yang menjadi kendala adalah 1,4 triliun.

Sehingga ini ada banyak yang menyampaikan bahwa laporan belum jelas dan lain-lain mungkin kami berpikir bahwa berikan dahulu dengan catatan-catatan khusus supaya kalau salah menggunakannya tetap salah tetapi kalau dapat digunakan baik maka itu juga sangat bermanfaat. Karena semua KONI, atlet dan juga lain-lain ini mereka pasti berharap hanya *statement* Gubernur Papua bahwa transportasi, akomodasi, konsumsi Papua sebagai tuan rumah bertanggung jawab. Itu komitmen dari semua provinsi, 34 provinsi di Indonesia mereka pegang komitmen itu. Jadi kalau sudah ada di Papua kalau Papua bilang kekurangan para atlet dan semua bilang Papua kekurangan ini itu maka Indonesia juga kena, jadi kita semua bisa malu sama-sama di situ. Jadi ini kita ditingkatkan untuk menyuarakan aspirasi rakyat. Jadi kami mohon dari kakak-kakak yang ada di sini untuk meneruskan kepada Pak Menteri besok kalau ada pertemuan.

Mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ada lagi? Silakan.

ANGGOTA DPR PAPUA (HERLIN BEATRIX MARYKE MONIM, S.E.):

Baik terima kasih untuk waktu.

**Yang terhormat Pak Wakil Ketua Komisi X.
Juga Anggota Komisi X, Prof. Djohar
Serta Ketua Pansus dan rekan Anggota Pansus DPR Papua.**

Salam sejahtera.
Selamat siang untuk kita semua.

Terima kasih.

Saya mungkin pertama mengapresiasi dan terima kasih kepada DPR RI yang memberikan dukungan terkait pendanaan bagi pelaksanaan PON 2020 di Provinsi Papua dalam hal ini dukungan APBN sehingga semua bisa berjalan dan terkait dengan pembangunan infrastruktur juga yang menggunakan dana APBN dan *venue-venue* mungkin saya sedikit menyimak terkait kunjungan kemarin Komisi X ke Papua. Memang itu kalau tidak salah dalam berita saya membaca karena kita Pansus PON DPRP tidak sempat bertemu dengan Komisi X.

Seharusnya waktu itu kita bisa berjumpa karena memang kami dari Pansus ini menampung semua permasalahan tidak hanya secara dari luar global tetapi di dalamnya, Pansus berjumpa dengan setiap klaster dan masing-masing sehingga itu ada banyak masalah yang bisa kita bicarakan bersama. Tetapi terima kasih atas dukungan dan Komisi X DPR RI telah

melihat bagaimana persiapan Papua yang dengan serius sekali bahkan Pemerintah Provinsi Papua menggunakan anggaran yang sangat besar dari APBD untuk terselenggaranya PON 2020.

Memang ada beberapa terkait dengan kunjungan didapatkan kemarin akses jalan masuk yang memang belum rampung tetapi saat ini sedang dikejar. Saya menyampaikan ini beberapa hal terkait dengan penyelesaian akses jalan masuk sedang dikebut dan dikejar untuk menyelesaikan. Karena Saya Ketua Komisi IV yang membidang infrastruktur terus berkomunikasi untuk menanyakan bagaimana bisa dan dipastikan menurut Kepala Dinas bisa selesai sebelum pelaksanaan. Ini yang pertama.

Yang kedua terkait dengan kami juga mengikuti bagaimana DPR RI ketika pada tanggal kalau tidak salah saya mengutip itu diri 3 Juni 2021 itu DPR RI ada berjumpa dengan Menpora dan menyampaikan bahwa PON ini menjadi momen untuk menunjukkan harga diri bangsa Indonesia. Saya mengikuti dan membaca di media. Jika memang kami sangat mendukung sekali dan menyetujui bahwa bukan hanya menjadi harga diri orang Papua tetapi menjadi harga diri bangsa Indonesia. Sehingga terkait dengan apa yang sudah direncanakan tadi sudah disampaikan kami memohon dukungan sehingga tentu ketika Komisi X mengunjungi ada masih banyak bahkan sekarang beberapa kontingen atau dari provinsi yang sudah datang memang masih ada terdapat beberapa kekurangan-kekurangan tetapi ini sedang dikejar dan dikebut. PB PON juga sedang mempersiapkan bagaimana semua bisa diatasi dengan anggaran yang ada.

Namun diharapkan agar anggaran yang sudah dianggarkan sebenarnya tadi terkait dengan kekurangan itu bisa segera kita dapat jalan keluar dan solusi terutama ketika kita berjumpa Komisi X bisa mendapatkan apabila besok pertemuan dengan Pak Menteri kami bisa mendapatkan jawaban sebelum kami pulang ke Papua. Sehingga masih ada beberapa hari di sini, bisa kemudian kami dipertemukan ataupun setidaknya DPR RI dapat menjadi perpanjangan tangan dari kami untuk menyampaikan ini. Sehingga ketika kami kembali juga bisa memberikan kepastian kepada masyarakat terutama dalam penyelenggaraan PON ini.

Tentu apa yang tadi disampaikan *multievent* ini menjadi kiblat bagi bangsa Indonesia untuk menunjukkan jati diri bangsa kepada negara-negara lain terutama negara-negara tetangga yang kemudian bisa melaksanakan *event* internasional juga di Papua. Saya pikir dari status seluruh stadion yang Bapak mereka melihat secara langsung tidak hanya bisa digunakan secara nasional tetapi juga internasional, sehingga ini juga menjadi harga diri bangsa kita. Terima kasih untuk kepercayaan pemerintah dalam mendukung pelaksanaan PON dan memberikan kepercayaan Papua menjadi tuan rumah. Kami DPR Papua seluruh mendukung sehingga *event* ini bisa berjalan dengan baik dan tentu seluruh harapan kita semua dapat berjalan dengan baik.

Terima kasih. Mungkin itu saja dari saya silakan.

KETUA RAPAT:

Silakan kalau masih? Iya Pak.

ANGGOTA DPR PAPUA:

Terima kasih Pimpinan.

Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua dan Anggota Komisi X.

Saya melanjutkan sedikit dari teman-teman Pak. Pada prinsipnya dari hasil pertemuan terakhir dengan PB PON dikatakan bahwa memang sudah dijanjikan ada 800 juta untuk dikucurkan awal, 800 miliar itu. Tapi sampai hari ini belum ada terakhir kita mau berangkat kemarin lagi berkoordinasi juga belum ada. PB PON berpendapat kalau itu sampai akhir bulan belum masuk dananya mungkin menyerah kalau begitu Pak. Karena begini, kalau menyangkut makanan itu semua sudah harus *cash*. Memang ada pihak ketiga sudah diatur untuk melaksanakan ini tapi ada suatu rumor yang berkembang bahwa PON tidak ada uang sehingga keraguan dari pihak ketiga itu sangat besar. Hotel-hotel pun juga begitu semua kontrak hotel kan harus ada DP, minimum ada DP. Itu juga menjadi dasar tidak percaya bahwa ini kelihatannya kabur ini kalau kita biasa bilang itu gelap, gelap di depan kita begitu.

Kemudian ketiga Pak ada persoalan besar yang dihadapi ketika dana terlambat turun adalah proses ini yang paling bahaya. Ada proses pencairannya dana dan penggunaan. Tata cara penggunaannya itu berupa ada mekanisme yang undang-undangnya, ini semua pihak ketiga Pak. Jangan sampai nanti setelah PON pada ditangkap semua gara-gara sebuah proses yang dilanggar begitu. Jadi setelah kami beberapa sub klaster juga kita ketemu di Timika semua sudah berantisipasi. Bahkan di dalam tender itu kan dipisahkan untuk mulai tender tapi tanda tangan kontrak belum. Itu semua sudah dilaksanakan. Tapi untuk tanda tangan kontraknya itu kan menunggu ada dana masuk itu Bapak.

Jadi menurut kami harus ada ketegasan soal dana itu apakah bisa turun selambat-lambatnya sebelum akhir bulan ini. Karena apabila tidak saya yakin ada semacam tidak baik ya artinya hal-hal yang buruk bisa terjadi begitu. Ada beberapa pihak ketiga sudah laksanakan. Nah kalau sampai terjadi dananya lambat, turun dan menyerah PB PON ini kan pasti terjadi keributan. Ada yang sudah bekerja terlebih dahulu yang belum dibayar dan lain-lain dan lain-lain akan banyak sekali Bapak. Belum lagi relawan, relawan jadi kan ada sekian puluh ribu. Terakhir kemarin diputuskan karena dana belum jelas itu 15 ribu relawan. Itu juga butuh dana segala macam.

Jadi kesimpulannya Pak kami ini adalah meminta ketegasan pusat soal dana itu. Kalau memang enggak bisa ya bilang saja enggak bisa jadi kita di daerah enggak usah menunggu-mennunggu, enggak usah kita berantisipasi begitu. Kalau memang enggak ada dana ya sudah stop. Sebenarnya kita dari Pansus pun hampir tiap hari kami jalan turun di lapangan kemudian *hearing-*

hearing dengan PB dan sub klaster. Memang secara fisik oke tapi kan banyak hal di luar fisik yang harus dilengkapi begitu terutama dari sisi operasional itu.

Jadi belum lagi dana untuk operasional TNI-Polri itu juga ditunggu-tunggu oleh institusi itu karena di Papua salah satu syarat itu tentu keamanannya. Ada beberapa PON, KONI bahkan membawa ini Pak membawa Brimobnya begitu karena mungkin ada rasa takut dan lain-lain. Ini kan hal yang sangat tidak etis kalau begitu. Jadi kesimpulannya begitu Bapak. Mohon ada ketegasan kalau bisa tidak lewat dalam bulan ini begitu karena kalau sudah lewat wah ini ada suatu masalah yang sangat serius begitu.

Saya kira demikian Pimpinan. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Masih? Ya silakan.

ANGGOTA DPR PAPUA:

Baik terima kasih.

Pimpinan Komisi X DPR RI.

Anggota, Pak Djohar yang sudah menerima kami.

Teman-teman anggota Pansus DPR Papua.

Saya mungkin ya singkat saja dan saya hanya mempertegas saja sebagaimana tadi dijelaskan dari awal oleh Pak Ketua Pansus bahwa kami dari Pansus kami ke ke Jakarta untuk ingin memastikan komitmen dari pemerintah pusat tentang dana yang dialokasikan melalui APBN untuk mendukung pelaksanaan PON Papua XX. Karena dari berbagai upaya yang dilakukan oleh eksekutif hingga hari ini belum jelas padahal berbagai persiapan sudah di penghujung untuk memasuki pelaksanaan kegiatan yang nanti pembukaannya tanggal 2 dan mungkin ada cabor yang sudah mendahuluinya di tanggal 27.

Karena itu kami mungkin minta secara politik, dukungan politik dari Komisi X DPR RI untuk kita minta penjelasan kira-kira apa kendalanya sehingga dana ini sampai hari ini tidak bisa turun. Kalau ada persoalan mengapa tidak dibicarakan sebab ini sudah persiapan-persiapan dan di sana ada beberapa *item* pembiayaan yang memang sangat membutuhkan biaya itu dana itu. Misalnya konsumsi, akomodasi, transportasi, SDM-nya sehingga ini yang kami berharap Bapak/Ibu dari Komisi X DPR RI yang juga membidangi bidang olahraga kita sama-sama berkomunikasi secara politik, mendorong, minta kejelasan tapi juga kalau dapat segera uang ini ditransfer sehingga bisa membantu pelaksanaan mendukung kegiatan.

Saya pikir mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi.

KETUA RAPAT:

Cukup? Cukup ya.

Bapak/Ibu yang saya hormati.

Saya kira sudah sangat jelas ini ya, sudah sangat jelas maksud dan tujuan kemudian apa yang harus mungkin respons dari ini terutama pemerintah pusat. Dalam hal ini mungkin tidak mesti Kemenpora tetapi karena ini urusannya sudah teknis transfer mentransfer itu berarti Kementerian Keuangan dan besok konon katanya mau ke Kementerian Keuangan. Tapi enggak mau ke Kemenpora? Tapi sudah bersurat apa belum? Sudah ya? Sudah bersurat ya. Oh ya. saya kira ini.

Prof. Djohar mau menanggapi dahulu? Silakan nanti. Bagaimana? Oh *ndak anu* mau sampaikan saja dahulu nanti kita.

Bapak/Ibu yang saya hormati.

Saya kira sudah jelas apa yang disampaikan dan memang ini sebetulnya sudah karena eksekusi kan bukan legislatif ya, bukan legislatif ini eksekusi. Jadi mestinya memang hal-hal begini tidak hanya DPR yang datang DPR Papua tetapi mungkin bersama eksekutif maksudnya bersama PB PON, mungkin bersama juga ini. Karena transfer kan juga tidak ke Bapak-bapak, artinya tidak ini bukan sudah masuk ke wilayahnya eksekutif, sehingga dan hebat juga sih karena tahu tentang apakah dana sudah ditransfer atau belum. Ini padahal mestinya kalau sudah teknis begini semuanya adalah sudah antar eksekutif.

Jadi tentu kita mendorong, tetapi kalau ada problematika apalagi nanti menghambat dan sebagainya saya kira baik ada Pansus kemudian mengawal supaya ini lancar tidak ada masalah. Tadi disampaikan secara teknis kan *ndak* mungkin tender atau apa kemudian sudah menang tanpa ada dana awal dan seterusnya dan seterusnya. Tapi sekali lagi ini sudah masuk ke wilayah teknis sehingga tentu akan kita sampaikan semuanya. Hanya juga tadi saya yang tadi memberikan catatan memang sebetulnya yang begini bahwa saya kira sah-sah saja ini membawa mitranya ya. Kan ini dengan Dinas Pemuda Olahraga ya, juga mungkin PB PON juga mungkin yang ada di situ.

Tapi saya tadi perlu menyampaikan dahulu Komisi X datang ke sana itu dua kali juga kan memang apakah dipertemukan dengan DPR atau tidak, apakah dipertemukan dengan Pansus atau tidak kita juga tidak tahu. Kita kan semuanya adalah tamu mereka, sehingga tamu mereka yang terima siapa akan di ke manakan dahulu dan seterusnya ya tergantung tuan rumah dan informasi ini juga sudah disampaikan oleh Pak Wali Kota Jayapura, Pak Tomi. Itu juga sudah menyampaikan bahkan di atas panggung Beliau menyambut juga begitu menyampaikan beberapa hal. Meskipun dia juga pamitan bahwa mohon maaf Pak DPR ini bukan urusan Bapak-bapak mungkin, ini urusan kami begitu. Jadi urusan kami itu maksudnya karena sesungguhnya bisa ada jalan keluar.

Tetapi kalau kemudian nanti ini tadi Pansus PON Papua dan PEPARNAS XIV ke Kementerian Keuangan saya kira ini lebih bagus hanya bisa juga lebih lancar lagi juga kalau dengan Kementerian Pemuda Olahraga. Satunya karena ini pemerintah daerah bisa juga ke Kemendagri karena semua kan ke Dirjen Bina Administrasi Keuangan Daerah. Hanya sekali lagi ini karena sudah menyangkut teknis maka tidak ada lain kecuali mungkin difasilitasi dan saya tadi sudah *chat* juga ini ke Pak Gatot supaya bisa apa sebelum atau sesudah ke Kementerian Keuangan. Tapi belum direspons mungkin ada. Tadi ada Pak Gatot enggak? Ada ya? Oh rapat koordinasi dengan?

Ini sudah dapat jawabannya. "*monggo* mau jam berapa untuk besok pagi karena ini habis dengan Pak Ketua Komisi X di *press room*". Oh jadi Beliau masih di sini, masih di *press room* ini, masih di DPR, masih di Senayan, "tapi buruan ke kantor karena rapat PON" jadi karena rapat PON. Jadi ini mungkin sudah akan diterima Pak. Silakan mungkin nanti cuma jam berapa, jam berapa harus ke mau ke?

KETUA PANSUS PON XX DAN PEPARNAS XVI (KAMASAN JACK KOMBOY):

Izin Pak.

Mungkin kami menyesuaikan saja kesiapan Pak Gatot paginya jam berapa kita merapat atau jam 10.00 WIB kah begitu.

KETUA RAPAT:

Jadi ini ada respons langsung dengan Pak Gatot jam 10.00 WIB. Nanti ke Kemenkeu kapan? Jam berapa? Kapan harinya? Hari ini? Oh hari Kamisnya ya. Jadi oke berarti nanti bahannya lengkap berarti dari kami sudah. Besok juga kami akan menyampaikan resmi juga ketika SKN. Tapi Bapak/Ibu ini sudah juga bertemu juga dengan Pak Gatot paling tidak. Saya kira dengan Menteri enggak apa-apa cuma lebih paham Sesmen, lebih paham semua ini sudah mulai teknis soalnya. Ini masalah teknis nanti Pak Sek. Pak Menteri ini kerjanya dari dahulu jadi DPR teman kami di sini jadinya saya kira kalau sudah sampai kapan membuka rekening, kapan tutup rekening saya kira yang tahu Pak Sesmen ini, Pak Gatot Dewa Broto. Jadi itu mungkin Bapak/Ibu.

Jadi nanti kayaknya ini perlu pengawalan betul tetapi tampaknya harus selalu ini Bapak-bapak mumpung judulnya pansus ini barang dengan selalu membawa mestinya membawa eksekutifnya sebagai mitra sehingga tidak kemudian ini nanti hasilnya disampaikan ke sana. Kalau Bapak/Ibu kan enggak bisa ini, syarat-syarat ini harus dipenuhi, syarat-syarat itu harus dipenuhi kan *ndak* bisa. Karena andaikan tadi misalnya ada catatan seperti yang disampaikan oleh Pak Tomi kemarin disampaikan bisa sebetulnya itu bisa diatasi. Uang kan barangnya sama ya Pak, uang di Papua uang di sini sama juga. Jadi nanti mana dahulu apa dahulu dan seterusnya itu tentu teknis saya kira tapi lebih pasnya saya kira Kementerian Keuangan. Mudah-

mudahan Kementerian Keuangan yang membidangi ini juga menyiapkan orangnya yang pas untuk bisa langsung memberikan masukan-masukan kepada Bapak/Ibu.

Sungguhpun tadi dalam benak saya memang ini enggak bisa kemudian padahal waktunya sudah dekat, terlalu jauh ini Bapak DPR datang jalan sendiri ini nanti jalan sendiri ini bahaya harus jadi kalau kayak begini mestinya bersama, selesai dan kalau saya karena ini meskipun Papua ini ada otonomi khusus tetapi tetap saja birokrasi itu ada kalau pemerintah daerah itu tetap di bawah Kementerian Dalam Negeri. Sehingga sebaiknya memang ada *address up* yang ke Kementerian Dalam Negeri. Kalau bisa ke Kementerian Dalam Negeri lebih bagus lagi.

Saya kira itu mungkin sementara dari saya. Pak Prof. Djohar kalau mau menambah.

F-P. GERINDRA (Prof. Dr. Ir. DJOHAR ARIFIN HUSIN):

Terima kasih Pimpinan.

Para sahabat-sahabat, teman dari Papua.

Ini semua teman-teman, ini Ketua Pansus ini mantan pemain timnas sepak bola, waktu saya PSSI dia pemain. Ya bersyukur semua yang kita inginkan sudah disampaikan hari ini dan kita akan tanggapinya dengan serius ya. Tadi pun kita beri tahu teman-teman bahwa ada teman-teman dari DPR Papua hadir di sini. Mudah-mudahan besok kita akan bertemu dengan Menpora jam 14.00 WIB ya, nanti Pimpinan akan bicarakan, kami akan bicarakan bagaimana jalannya lah ya agar masalah-masalah ini bisa diselesaikan sebelum PON sendiri. Tentu dari Menteri Keuangan barangkali besok juga ada wakil ya, ada yang mewakili Menteri Keuangan atau menterinya datang itu barangkali lebih mudah bagi kita. Itu mudah-mudahan bisa lancar dan besok Bapak diterima jam 10.00 WIB di Menpora ini sudah mendekati arah-arahnya ini begitu.

Terima kasih, mudah-mudahan PON sukses dan salah satu waktu itu Ketua PSSI mendukung Papua rumah rumah, padahal provinsi saya Sumatera Utara ingin jadi tuan rumah, bersaing dengan Papua ya. Tapi saya orang Sumut tapi saya pikir ini harus lebih diutamakan. Jadi saya memilih Papua waktu itu sebagai calon tuan rumah dan akhirnya dimenangkan dalam pertemuan tersebut.

Itu saja Pimpinan. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Prof. Djohar.

Oh iya ini sambung ini soalnya meskipun di sana lebih hitam dan sini lebih putih tapi sama-sama pengolah bola ya begitu ya, jadi kakinya

semuanya baunya bola semua ini. Jadi jangan khawatir saya kira Prof. Djohar ini memang kalau untuk kan pemuda dan olahraga. Nah untuk olahraga memang Beliau selalu akan mengawal, saya kira kita semuanya akan mengawal dan terutama PON ini. Saya kira jangan sampai ada lubang ini, bolong. PON kan terus ini, ini tertunda ini kan karena pandemi ya dan jangan sampai ada problematika lain.

Saya kira catatan Komisi X ada Panja Pra PON itu ya tiga sukses paling tidak. Sukses penyelenggaraan, sukses pelaksanaan, penyelenggaraan, administrasi, kemudian sukses ekonomi sebetulnya. Jadi kalau apa gunanya ramai-ramai di Papua tapi kemudian masyarakatnya tidak mendapatkan dampak apa pun. Jadi tiga itu, satunya *pasca* PON jadi ada empat. Ada empat catatan dari Panja Pra PON kemarin. Satunya *pasca* PON maksudnya misalnya infrastruktur sudah jadi, sudah dibangun rata-rata pada terbengkalai itu atau rata-rata banyak bermasalah secara hukum juga dan akhirnya tidak jadi tempat yang menarik.

Oleh karenanya ada beberapa saran dari Komisi X misalnya kerja sama dengan perguruan tinggi yang ada jurusan atau prodi olahraga misalnya. Jadi rusak boleh karena dipakai bukan rusak karena dibiarkan tidak dipakai, jadi rusak sih boleh karena semua ini kalau dipakai rusak ya cuma kalau rusak karena dipakai itu lebih berharga, lebih bermakna daripada rusak karena terbengkalai, tidak dipakai. Ini kan banyak kan beberapa ya di mana itu, di Riau, kemudian di mana? Sumatera Selatan dan seterusnya-seterunya, Kaltim juga dan seterusnya banyak contoh, nah ini untuk tidak diteruskan *pasca*-nya.

Jadi ini kan kita lihat Stadion Papua Bangkit atau Lukas Enembe Stadium dan sebagainya begitu megahnya. Ini jangan sampai selesai sekali ketika penyelenggaraan PON kemudian setelah itu tidak digunakan karena memang ya *maintenance*-nya itu kan ya mahal ya. Tapi kalau dipakai itu tidak ada masalah saya kira dan semua bertanggung jawab. Saya kira begitu. Ada hal lain yang cukup Pak? Silakan ada.

KETUA PANSUS PON XX DAN PEPARNAS XVI (KAMASAN JACK KOMBOY):

Baik terima kasih Pimpinan.

Memang tadi apa yang disampaikan oleh Pimpinan itu benar bahwa kami ini harus jalan dengan eksekutif. Pak Kadisnya mungkin akan bergabung pada saat kita ke Kemenkeu, kepada Kementerian Keuangan. Karena kita sudah ya sudah berkomunikasi dan kebetulan hari ini ada peresmian *venue* rugby jadi Beliau belum sempat bergabung bersama-sama dengan kita. Memang selama ini kita mendesak terus eksekutif untuk harus ada kejelasan terkait 1,4 triliun. Kayaknya memang kami harus hadir di Jakarta ini kayaknya ini. Artinya itu yang membuat ambil kami hadir di sini untuk mungkin bisa dapat kejelasan yang pasti karena klaster bertanya-tanya, masyarakat bertanya-tanya bagaimana *event* ini, kira-kira seperti itu.

Yang berikut Pimpinan tadi saya sempat mendengar besok dengan Kemenpora itu terkait revisi itu ya?

KETUA RAPAT:

SKN iya.

KETUA PANSUS PON XX DAN PEPARNAS XVI (KAMASAN JACK KOMBOY):

SKN ya.

KETUA RAPAT:

Sistem Keolahragaan Nasional ya betul.

KETUA PANSUS PON XX DAN PEPARNAS XVI (KAMASAN JACK KOMBOY):

Mungkin karena kebetulan saya ini juga mantan atlet dan di komisi yang bicara olahraga dan ketua komisi hadir dan beberapa anggota. Jadi mungkin kami bisa dapat ya drafnya atau apa mungkin kita juga bisa dapat supaya mungkin hal-hal apa yang bisa kita juga dorong di provinsi kami. Karena ini terkait tadi disampaikan oleh Pak Ketua bahwa selesai *event* ini terus apa yang dilakukan ini kira-kira itu memang menjadi *concern* kita di Pansus dan kami di komisi bahwa selalu hal yang kami diskusikan dengan Pak Kadisporda adalah *pasca event* ini apa yang kita lakukan karena ini dibangun dengan biaya yang cukup besar seperti itu.

Mungkin demikian Pimpinan, begitu.

KETUA RAPAT:

Baik saya kira ini ternyata kegelisahan ini terjawab ini kalau hanya sendiri ke ini nanti harus balik lagi ke Papua nanti balik lagi ke sini enggak selesai-selesai padahal tanggal 2 sudah pembukaan dan ya *alhamdulillah* ini terima kasih Pak Kadisnya mau bertemu juga di Kemenkeu dan jadi nanti biar selesai. Kalau bisa sih ya ada meskipun ini kita juga tetap gelisah ya. Komisi X juga tetap samalah saya kira karena nanti malu juga kita Komisi X. Komisi X *ngapain* kok enggak mengingatkan atau apa. Sama, jadi Bapak/Ibu saya kira sudah tepat ini. Hasil politik kan ya begitu ya mendesak dan seterusnya dan seterusnya. Ya kan enggak bisa apa-apa kita mendesak kemudian untuk supaya ada kejelasan, betul kalau Bapak/Ibu tidak gelisah ya keliru saya kira.

Jadi kegelisahan ini harus dijawab dengan aksi dan saya kira Bapak/Ibu betul sudah, sungguhpun sudah dekat tapi karena semakin dekat tidak ada kejelasan nanti malah ada preseden buruk. Sungguhpun tadi Pak jadi kalau secara Pak Wali Kota Jayapura tahu juga sebenarnya ada solusi-solusi administratif yang tinggal nanti menyelesaikan. Tapi memang diselesaikan secara administratif itu ya oleh yang berwenang, oleh gubernur

dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang nanti ada jaminan mungkin ada nota kesepahaman atau mungkin pakta integritas dan seterusnya dan seterusnya apabila ada problematika.

Karena informasi dari Pak Wali Kota memang ada problematika sebelumnya. Tapi enggak ada masalah problem ya saya kira masalah ya saya kira tidak bisa kemudian dibiarkan begitu saja tetapi ini kan juga harus jalan Pak. Jadi ini yang saya kira sama, jadi kita enggak usah terlalu kemudian mencampuradukkan, kemudian nanti ya ini sudah masalah kemudian ada menimbulkan masalah berikutnya kan tidak begitu. Jadi ya oke itu masalah ya, kita terima kemudian di-cut.

Kemudian kemarin kita dialog juga sampai agak teknis itu dengan Pak Wali Kota dan saya kira Pak Wali juga ada solusi-solusi bahkan menyampaikan lewat Pak Kadis. Tapi kan otoritasnya ada di sini, ada di Kementerian Keuangan. Jadi saya kira demikian. Sekali lagi terima kasih atas ini kehadirannya dan nanti kalau saya lupa nanti Prof. Djohar sudah menyampaikan nanti jam 14.00 WIB kita ini.

Kemudian yang kedua tentang draf nanti diberi draf RUU SKN. Nanti kalau ada, kalau atlet kan lebih jeli ini. Atlet kan juga harus merasa pada saatnya nanti akan tua kan Pak. Pada saatnya sudah tidak banyak yang produktif ketika masih 20-an tahun tapi kalau sudah usia tua, sudah pensiun nanti enggak ada pengikutnya. Enggak ada yang mau jadi atlet lagi kalau kemudian ternyata nasib atlet yang berprestasi di tingkat nasional, internasional ternyata nasibnya enggak jelas. Ini kan RUU ini maksudnya adalah supaya menjamin kehidupan mereka.

Sekarang ini sudah ada perbaikan-perbaikan yang berprestasi, medali dan seterusnya, jadi ASN, jadi apa, dapat bonus. Bonus saja saja itu kadang-kadang hanya untuk pesta selesai tapi setelah itu. Tapi ini sekarang sudah ada perbaikan tetapi nanti akan lebih kuat lagi kalau RUU ini juga dikuatkan. Makanya saya kira andil dari para atlet yang pelaku langsung ini nanti akan bisa, nanti yang kita ini, soalnya Indonesia ini ternyata di tingkat dunia ini hebat itu atletnya tidak hanya yang normal loh Pak, yang kemarin di Olimpiade *Paralympic* kita ini jago ternyata.

Cuma perhatian kita terhadap mereka yang disabilitas itu ternyata kurang padahal ternyata mereka berprestasi tingkat dunia Pak. Kemarin kan luar biasa ya, yang banyak mendapatkan medali malah yang disabilitas. Kalau yang normal ini bulu tangkis saja? Bulu tangkis saja yang lain kan tidak. Tapi kalau yang disabilitas itu juga sama. SKN juga nanti disabilitas harus diperhatikan karena undang-undang disabilitas kita sudah punya.

Demikian saya kira.

KETUA PANSUS PON XX DAN PEPARNAS XVI (KAMASAN JACK KOMBOY):

Pimpinan satu terakhir, ini aspirasi terkait besok ini.

Kalau boleh dalam Sistem Keolahragaan Nasional yang sedang Bapak mereka mau ini kami mungkin titip saja. Kami melihat bahwa di pusat itu setelah mereka berprestasi ada ruang-ruang yang bisa untuk mereka menjadi PNS dan lain-lain. Di daerah ini yang susah kita mengaturnya. Jadi mungkin kita menitip apabila kita juga punya atlet yang berprestasi peraih emas atau medali juga ada ruang buat kami di daerah. Karena mereka prestasi membawa nama daerah ya paling tidak mereka juga ada punya peluang yang sama untuk menjadi PNS atau prioritaslah seperti itu.

Mungkin demikian Pimpinan. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Sebelum lupa ditulis saja itu, ini mumpung ingat juga, artinya tidak hanya tingkat nasional ya Pak tapi di daerah-daerah ya. Saya punya juga binaan-binaan saya itu yang berprestasi di tingkat nasional tapi sekarang hanya Tarkam Pak, antar kampung di bon sana di bon sini padahal timnas Pak. Ini kan berarti karena di daerah, betul, tambahannya Mbak Kholilah, dicatat ini mantan atlet ini.

Demikian saya kira mohon maaf karena waktu juga dan sekali lagi terima kasih atas masukan-masukan yang saya kira ini tidak hanya kepentingan Bapak/Ibu di Papua tetapi kepentingan Komisi X juga. Saya kira demikian dan sekali lagi dengan mengucapkan *alhamdulillah rabbil alamin* maka audiensi ini diakhiri. Saya akhiri.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 15.30 WIB)

JAKARTA, 21 SEPTEMBER 2021

**a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,**

**DADANG PRAYITNA, S.IP, M.H.
NIP. 196708061990031003**